

Katingan Ingin Raih WTP



Sumber: *cybersulutnews.co.id*

KASONGAN - Di tahun 2017 lalu, opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Katingan mengalami penurunan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) salah satu penyebab penurunan opini tersebut adalah terkait dengan tidak bisa di pertanggung jawabkannya kas daerah senilai Rp35 miliar. Namun untuk audit di tahun 2018, Pemkab Katingan menginginkan hasil opini bisa kembali menjadi WTP.

“Sebab sekarang ini segala upaya sudah dilakukan. Baik tertib administrasi maupun penyelesaian catatan-catatan yang diberikan oleh BPK RI,” kata Bupati Katingan Sakariyas kepada Kalteng Pos, Kamis (31/1).

Dirinya yakin, Katingan bisa kembali meraih opini WTP tersebut. Sebab menurut Bupati, selama ini berbagai permasalahan sudah mampu dibenahi oleh Katingan, termasuk masalah penataan aset dan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya opini tertinggi tersebut, selama empat tahun berturut-turut sebelumnya.

“Jadi kami ini tidak ada permasalahan baik dari sisi administrasi maupun penataan aset. Tinggal kita membenahi yang sedikit-sedikit saja. Termasuk catatan yang diberikan oleh BPK RI itu sendiri. Apalagi jika catatan itu kan, enak kita tinggal apa yang jadi sorotan BPK, itu yang kita benahi,” terangnya.

Selanjutnya, dia juga mengingatkan kepada seluruh bawahannya, apabila ada temuan temuan. Agar segera direspon dan ditindak lanjuti. Dirinya tidak ingin menunda-nunda suatu pekerjaan.

“Jika bisa kita selesaikan hari ini, buat apa lagi harus nunggu besok. Segera selesaikan saja. Jadi kita harus bekerja cepat,” tegasnya. **(eri/ram).**

Sumber :

Kalteng Pos, Jumat 1 Februari 2019, hal 26.

https://www.kaltengpos.co/READ/-16985-pemkab_diminta_kreatif_menggali_potensi_daerah.html

<http://tanjungpinang.bpk.go.id/?p=4934>

Catatan :

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (*TMT/Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (*TW/Adverse Opinion*).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Kriteria pemberian opini adalah:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.